

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta; Rajawali.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta; Kencana.
- Achmad Ruslan, 2011, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Tangerang; Rangkang Education
- Achmad Ruslan, 2021, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia*, Tangerang;
- Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Makassar; Phinatama Media.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2024, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Rajawali Pers.
- Baharuddin Lopa, 1987, *Permasalahan Pembinaan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang.
- Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta; Kencana.
- Fritz Edward Siregar, 2020, *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*, Jakarta; Konstitusi Press.
- Hamzah Halim dan Putera, Kemal Redino, 2009, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana Prenada Media Group.
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung; Alumni.
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika.

- Mahendra Kurniawan, 2007, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipasi*, Yogyakarta; Kreasi Total Media.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta; Kanisius.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Yogyakarta; Liberty.
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung; Refika Aditama
- Musakkir, 2014, *Problem Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia*, Jakarta; Sekretariat Jenderal KY RI
- Ni'matul Huda, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung; Nusamedia,
- Ni'Matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosdakarya Musanef, 2009 *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta; Gunung Agung.
- Saiful Anwar, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Glora Madani Press.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta; Rajawali Pres.
- Soerjono Soekanto, 2022, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Rajawali Press.
- Sudibyo Triatmodjo, 1983, *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Sujatmo, 1989, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta; PT. Rineka Cipta.

Yudi Widagdo Harimurti, 2021, *Negara Hukum dan Demokrasi Konsep dan Perkembangan Kontemporer*, Malang; Setara Press.

Zainuddin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum (Cetakan Kesepuluh)*, Jakarta; Sinar Grafika.

Jurnal

Bayu Indra Permana, et al, 2022, *Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada*, Jurnal USM Law Review, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang.

Fajrianto dan M. Fahrudin Andriyansyah, 2024, *Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Al Azhar Indonesia, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Indrawan Susilo Prabowoadi dan Muhammad Afandi, 2020, *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 2 Nomor 2, Riau, hlm. 137.

Sandy Mulia Arhdan, Yuslim, dan Khairul Fahmi, 2024, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Barat*, Unes Law Review, Volume 7 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara